



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.  
**UNIT KERJA** : COMPLIANCE DIRECTORATE

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMAD SOLICHIN LUTFIYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR KEPATUHAN
3. NHK : 415242

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 13.936.600.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.793.600.000
3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 416 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 97.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
7. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 408 m2/344 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 10.250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 1.653.000.000**

1. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI GRAND I/10 MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000



3. MOBIL, BMW BMW X5 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.  
1.500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	15.669.363.853
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.516.104.355
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	52.775.068.208
III. HUTANG	Rp.	805.220.425
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	51.969.847.783

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.